
ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2009 – 2013

Herni Sunarya
Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kupang

Abstract

The research was conducted by taking the location of the District Government Office Nagekeo. Object of this study is the Budget Nagekeo District fiscal year 2009 to 2013. Variables used in this study is the ratio of the independence, effectiveness ratio, the ratio of harmony, growth ratio, the ratio of the proportion of the budget. Type of used is quantitative such as district budget realization report Nagekeo. The results showed that the results of the achievement of financial self-sufficiency ratio of the area of the 2009 -2013 assessed is still lacking because it is on a scale ratio of 0 % - 10 % . Local financial independence with these achievements are in a relationship pattern instructive, where the dominant role of the central government over the independence of local governments that have not been independently assessed local governments implement regional autonomy. Average effectiveness ratio Nagekeo District Revenue was 99.14 % in the category are quite effective. There is no harmony between the apparatus and expenditure of public expenditure where expenditure is still higher officials of public spending, which the average public spending Nagekeo District during the year 2008 - 2012 is 32.38 % while the average expenditure apparatus Nagekeo District during 2009 - 2013 is 67.42 % . This suggests that more attention Nagekeo County Government services to the local and not the emphasis of public services that will be enjoyed directly by the public or the public . The average local government revenue growth during the year 2009-2013 Nagekeo by 58.86 % and showed positive growth

Key words: Ratio of Independence, Effectiveness Ratio, Ratio Harmony, Growth Ratio, Proportion Ratio Budgets and Financial Performance

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Untuk melihat kemampuan daerah dalam mengelola keuangan serta menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah, yaitu dengan menganalisa laporan yang telah dibuat pemerintah berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA). LRA menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah yang utama, karena anggaran dalam pemerintahan merupakan tulang punggung dari penyelenggaraan pemerintahan. Anggaran memiliki peran penting dalam stabilitas, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja

Hasil analisis terhadap kinerja keuangan daerah merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya dengan baik. Di samping itu pengukuran kinerja keuangan daerah juga sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Oleh karena itu, analisis kinerja keuangan daerah baik terhadap perhitungan

pendapatan maupun belanja daerah perlu dilakukan. Selanjutnya ditunjukkan data proporsi pendapatan dan belanja Daerah Tahun 2009 – 2013 sebagai berikut.

Rata – rata proporsi Pendapatan Asli daerah terhadap total pendapatan untuk tahun 2008 - 2012 sebesar 3,29%, rata – rata proporsi dana transfer pusat terhadap total pendapatan untuk tahun 2008 - 2012 sebesar 86,38%, rata – rata proporsi transfer pemerintah propinsi terhadap total pendapatan untuk tahun 2008 - 2012 sebesar 3,22%, rata – rata proporsi Pendapatan lain – lain yang sah terhadap total pendapatan untuk tahun 2008 - 2012 sebesar 3,59%. Selain itu rata rata proporsi belanja aparatur daerah tahun 2008 – 2012 adalah 68,40% dan rata- rata proporsi belanja public tahun 2008 – 2012 adalah 31,60%

Dari kondisi keuangan sebagaimana dijelaskan di atas menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten Nagekeo masih menggantungkan pembangunannya pada dana perimbangan sehingga mengindikasikan rendahnya kemandirian daerah. Kondisi ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah masih tergolong rendah, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian ilmiah untuk mengetahui lebih jauh tentang kinerja keuangan daerah dan faktor penghambatnya, sehingga diharapkan informasi ini dapat berguna bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya. Dengan demikian, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui: a) Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagekeo ditinjau dari tingkat kemandirian Tahun 2009 – 2013; b) Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagekeo ditinjau dari tingkat Efektifitas Tahun 2009 – 2013; c) Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagekeo ditinjau dari tingkat Keserasian Tahun 2009 – 2013; Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagekeo ditinjau dari tingkat Pertumbuhan dan Proporsi APBD Tahun 2009 – 2013.

TINJAUAN TEORI

Analisis Rasio Keuangan Daerah

Penggunaan analisis rasio keuangan sebagai alat analisis kinerja keuangan secara luas telah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas sehingga secara teoritis belum ada kesepakatan yang bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, maka analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan (Mardiasmo, 2002: 169).

Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah (Halim, 2004: 233) yaitu rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi keuangan daerah dan rasio keserasian belanja. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pemerintah daerah (Halim, 2004: 232) adalah pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya, pemerintah kabupaten sebagai masukan dalam membina pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, masyarakat dan kreditur, sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman maupun membeli obligasi.

Dengan demikian dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja yang dapat digunakan seperti rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi dan rasio keserasian belanja, rasio pertumbuhan. Untuk itu, penjelasan terkait dengan rasio tersebut dapat diikuti berikut ini

Rasio kemandirian keuangan daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Rasio kemandirian dihitung dengan membagi total PAD dengan total belanja daerah dalam satuan persen (Suyana Utama, 2008:33). Semakin tinggi rasio ini berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak pemerintah pusat dan provinsi semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD.

Untuk menghitung Kemandirian Keuangan Daerah dapat digunakan rasio kemandirian keuangan daerah menurut Mahsun (2006: 153) berikut ini :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Subsidi pemerintah Pusat dan Propinsi serta Pinjaman daerah}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan akan disimpulkan berdasarkan kriteria pengambilan keputusan berikut ini:

Skala Interval Kemandirian Keuangan Daerah

Prosentase Kemandirian	Tingkat Kemandirian
0,00-10,00 %	Sangat Kurang
10,01-20,00 %	Kurang
20,01-30,00 %	Sedang
30,01-40,00 %	Cukup
40,01-50,00 %	Baik
>50,00 %	Sangat Baik

Sumber : Halim (2008 : 188)

Rasio Efektifitas

a. Rasio Efektifitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Halim (2004:234) rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio efektifitas bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan pemerintah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang ditargetkan. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas PAD} : \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan akan disimpulkan berdasarkan kriteria pengambilan keputusan yang dikemukakan oleh Mahmudi (2011:171) berikut ini :

Kriteria Kinerja Keuangan Berdasarkan Rasio Efektifitas

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99 %	Cukup Efektif
75% - 89 %	Kurang Efektif
< 75%	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi (2011:171)

b. Rasio Efektifitas Penerimaan Pendapatan dan Anggaran Daerah

Mahsun (2006:187) rasio efektifitas digunakan untuk mengukur tingkat output dari organisasi public terhadap target-target pendapatan sector public. Pengukuran tingkat efektifitas memerlukan data-data realisasi pendapatan dan anggaran. Untuk menghitung tingkat efektifitas penerimaan pendapatan dan anggaran daerah, maka dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas PPD} : \frac{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}}{\text{Anggaran Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Untuk menentukan kriteria efektifitas maka dapat digunakan acuan:

Kriteria Efektifitas Pendapatan Daerah

Persentase Capaian	Tingkat Efektifitas
< 100%	Tidak Efektif
= 100 %	Efektifitas Berimbang
> 100%	Efektif

Sumber : Mahsun (2012:187)

Rasio Keserasian

Halim (2004:235) mengemukakan bahwa rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja aparatur daerah dan belanja belanja pelayanan publik secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja aparatur daerah berarti persentase belanja modal (belanja pelayanan publik) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja aparatur daerah maupun belanja pelayanan publik terhadap belanja daerah yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Rasio keserasian diformulasikan sebagai berikut :

a. Rasio Belanja Aparatur Terhadap Total Belanja

Perhitungan rasio ini dimaksudkan untuk mengetahui proporsi belanja aparatur daerah terhadap total belanja yang dikeluarkan pemerintah daerah. Formula Rasio Belanja Aparatur terhadap total Belanja menurut Mahsun (2012:154) dapat ditunjukkan berikut ini:

$$\text{Rasio Belanja Aparatur} = \frac{\text{Total Belanja Aparatur}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

b. Rasio Belanja Pelayanan Publik Terhadap Total Belanja

Perhitungan rasio ini dimaksudkan untuk mengetahui proporsi belanja publik terhadap total belanja yang dikeluarkan pemerintah daerah. Formula Rasio Belanja Publik terhadap total Belanja menurut Mahsun (2012 : 154) dapat ditunjukkan berikut ini

$$\text{Rasio Belanja Publik} = \frac{\text{Total Belanja Publik}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Halim, 2004:235). Karena pemerintah harus membelanjakan kegiatan rutinnya untuk pelayanan dan gaji pegawai, maka alokasi belanja pembangunan dan belanja rutin harus disesuaikan dengan total pendapatannya berdasarkan kebutuhan dan potensi yang dimiliki.

Rasio Pertumbuhan (Analisis *Shift*)

Mahmudi (2011:162) Rasio pertumbuhan dilakukan untuk mengetahui dan mengevaluasi perkembangan kinerja keuangan serta kecenderungan baik berupa kenaikan atau penurunan kinerja selama kurun waktu tertentu. Sementara Halim (2004:272) bahwa Rasio pertumbuhan digunakan

untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dalam penelitian ini penulis gunakan pendapat halim dalam menganalisis data. Perhitungan rasio pertumbuhan dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$R = \frac{P_n - P_o}{P_o} \times 100\%$$

Keterangan :

R = Pertumbuhan

P_n = Realisasi pendapatan dan belanja pada tahun ke – *n*

P_o = Realisasi pendapatan dan belanja pada tahun awal sebelumnya

Dengan diketahuinya tingkat pertumbuhan sumber pendapatan dan pengeluaran suatu daerah selama beberapa periode tahun anggaran, maka data tersebut dapat digunakan untuk mengetahui bagian-bagian atau potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian khusus bagi pemerintah daerah. Sehingga pemerintah daerah dapat memperbaiki kinerjanya menjadi lebih baik .

Analisis Proporsi Pendapatan dalam APBD (Analisis *Share*)

Halim (2008:347) Analisis *share* terhadap pendapatan daerah bertujuan untuk mengetahui proporsi masing-masing komponen, pendapatan daerah, sehingga dapat pula diketahui besarnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Proporsi APBD dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Proporsi pendapatan dalam APBD (analisis *share*) =

$$\text{Share (S)} = \frac{\text{Pendapatan dalam APBD}}{\text{Total Pendapatan daerah}} \times 100\%$$

b. Proporsi pengeluaran/belanja dalam APBD (analisis *share*) =

$$\text{Share (S)} = \frac{\text{Pengeluaran dalam APBD}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Nilai kemampuan keuangan daerah yang diperoleh dari perbandingan tersebut diatas, kemudian diukur dengan kriteria kinerjanya, kemudian dibandingkan dari tahun ke tahun. Semakin besar rasio kemampuan daerah berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Kriteria Pengukurannya:

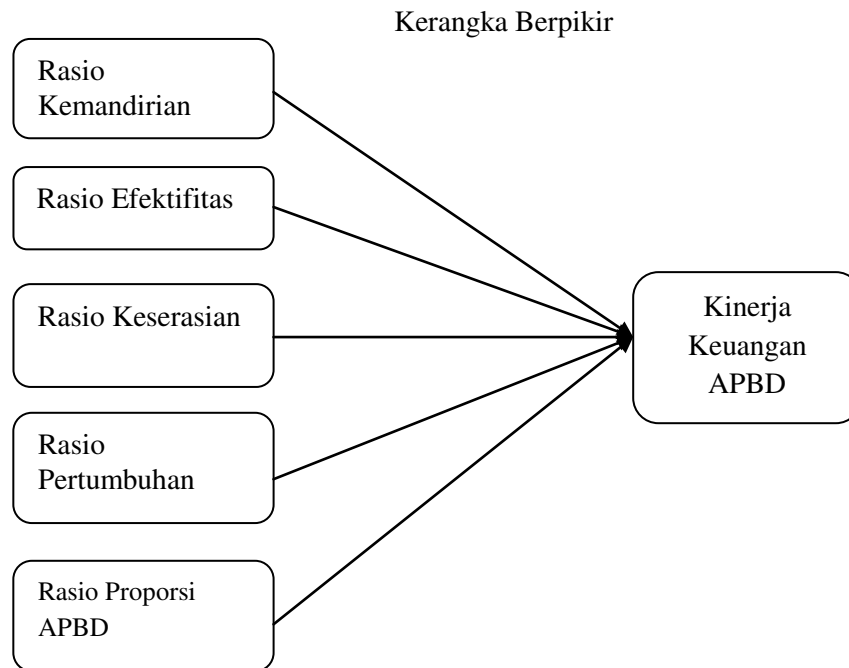
Interval Proporsi APBD

Interval Proporsi	Tingkat Proporsi
0,00-10,00 %	Sangat Kurang
10,01-20,00 %	Kurang
20,01-30,00 %	Sedang
30,01-40,00 %	Cukup
40,01-50,00 %	Baik
>50,00 %	Sangat Baik

Sumber : Halim (2008 : 347)

Kerangka Berpikir

Penilaian kinerja merupakan bagian dari proses pengendalian manajemen yang dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Analisa kinerja keuangan pemerintah daerah tidak hanya berguna sebagai evaluasi saja, tetapi karena tidak semua pengguna laporan keuangan memahami akuntansi dengan baik, maka analisa laporan keuangan juga digunakan untuk membantu memahami serta menginterpretasikan laporan keuangan pemerintah daerah tersebut. Salah satu cara untuk mengevaluasi laporan keuangan adalah dengan menggunakan analisis rasio keuangan pada pos-pos yang terdapat pada laporan keuangan. Untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektifitas dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah dan melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Penjelasan kerangka berpikir ini dapat ditunjukkan dalam gambar berikut ini:



Metode Penelitian

Jenis Data

- Data kuantitatif adalah data dalam bentuk angka-angka dan dapat dinyatakan dalam satuan hitung. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah angka-angka dalam laporan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2009- 2013.
- Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat yang merupakan jawaban responden atas pertanyaan yang diajukan tentang faktor penyebab menurun atau meningkatnya rasio – rasio keuangan daerah kabupaten Nagekeo.

Sumber Data

- Data primer, yang diambil dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara langsung dengan Informen di Bagian Pendapatan dan Bapeda Kabupaten Nagekeo tentang penyebab meningkat atau menurunnya rasio keuangan daerah.
- Data sekunder, yang telah disediakan oleh instansi terkait. Data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2009-2013.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan metode deskriptif komparatif, yaitu suatu metode analisis yang ditujukan untuk memecahkan masalah dengan cara mengumpulkan/menghimpun data, menyusun atau mengklasifikasikan, menganalisis dan menginterpretasikan serta membandingkan kinerja keuangan sesuai dengan teori yang relevan. Alat – Alat analisis yang digunakan adalah Rasio Keuangan Daerah berikut ini :

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Subsidi pemerintah Pusat dan Propinsi serta Pinjaman Daerah}} \times 100\%$$

2. Rasio Efektifitas (E)

$$E1 = \text{Rasio Efektifitas PAD} : \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$E2 = \text{Rasio Efektifitas PD} : \frac{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}}{\text{Anggaran Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

3. Rasio Keserasian (K)

$$K1 = \text{Rasio Belanja Aparatur} = \frac{\text{Total Belanja Aparatur}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$K2 = \text{Rasio Belanja Publik} = \frac{\text{Total Belanja Publik}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

4. Analisis Proporsi APBD (*Share /S*)

S1 = Proporsi pendapatan dalam APBD (analisis *share*)

$$\text{Share (S)} = \frac{\text{Pendapatan dalam APBD}}{\text{Total Pendapatan daerah}} \times 100\%$$

S2 = Proporsi pengeluaran/belanja dalam APBD (analisis *share*)

$$\text{Share (S)} = \frac{\text{Pengeluaran dalam APBD}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan dengan menggunakan rasio keuangan daerah sebagaimana dijelaskan di atas akan dianalisis, diinterpretasikan serta membandingkan kinerja keuangan setiap periode dan

selanjutnya dilakukan analisis pendalaman yang memfokuskan pada faktor penyebab perubahan rasio keuangan daerah dimaksud.

Analisis Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagekeo ditinjau dari tingkat kemandirian dalam tahun Anggaran 2009 – 2013

Untuk mengetahui kemandirian keuangan daerah kabupaten Nagekeo tahun 2009 s/d 2013 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tahun	PAD	PENDAPATAN DAERAH	RKD	Kriteria
1	2	$RKD = PAD/PD \times 100\%$		
2009	3.988.675.595	209.506.486.250	1,90	0,00-10,00 % = Sangat Kurang 10,01-20,00 % = Kurang 20,01-30,00 % = Sedang 30,01-40,00 % = Cukup 40,01-50,00 % = Baik >50,00 % = Sangat Baik
2010	13.308.642.575	294.216.042.916	4,52	
2011	8.841.252.067	383.872.977.887	2,30	
2012	13.450.142.930	432.482.649.006	3,11	
2013	13.896.315.450	420.537.624.250	3,30	

Sumber : Data Sekunder Olahan Penulis Tahun 2014

*RKD = Rasio Kemandirian Daerah

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kemandirian keuangan daerah Kabupaten Nagekeo tahun 2010 mengalami peningkatan mencapai 4,52 % atau mengalami peningkatan dari tahun 2009 sebesar 2,62% (4,52% - 1,90%) disebabkan oleh beberapa faktor antara lain *pertama*; adanya Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Bank NTT sebesar Rp. 2.802.545.672,72 dan di tahun 2009 Kabupaten Nagekeo belum menyertakan modalnya pada Bank NTT, perolehan Bagian Laba Atas Pinjaman Pada Koperasi dan Kelompok Masyarakat 79.515.000,00, adanya Penerimaan Jasa Giro 2.336.631.100,71, adanya Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 123.458.788,94 dan adanya Pendapatan Denda Retribusi 61.859.348,63. Dengan demikian jumlah pendapatan lain – lain yang mengakibatkan meningkatnya prosentase kemandirian daerah dalam tahun 2009 adalah sebesar Rp. 5.404.009.911, *kedua*; menurunnya total pendapatan Daerah sebagai pembanding PAD ditahun 2010 karena pemerintah Propinsi tidak memberikan dana penyesuaian untuk pembiayaan daerah baru sehingga prosentase pendapatan lain-lain menjadi meningkat.

2. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo ditinjau dari tingkat efektifitas Pendapatan Asli Daerah dalam tahun Anggaran 2009 – 2013

Analisis Rasio efektifitas bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan pemerintah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang di targetkan. Rasio efektifitas juga

menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan baik pendapatan Asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah, maupun realisasi pendapatan daerah yang ditargetkan sebelumnya. Oleh karena itu pengukuran evektifitas penerimaan dilakukan dengan dua pendekatan yakni efektifitas Pendapatan Asli Daerah dan Efektifitas Pendapatan Daerah.

a. Analisis Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Untuk mengetahui efektifitas Pendapatan Asli Daerah kabupaten Nagekeo tahun 2009 s/d 2013 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Rasio Efektifitas Pendapatan Asli daerah

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	RPAD	Kriteria
1	2	$RPAD = TPAD/RPD \times 100\%$	(%)	
2009	5,163,414,263	3.988.675.595	77,25	>100 % = Sangat Efektif 100 % = Evektif 90% - 99 % = Cukup Evektif 75% - 89 % = Kurang Evektif < 75% = Tidak Evektif
2010	8,422,106,828	13.308.642.575	158,02	
2011	10,839,819,216	8.841.252.067	81,56	
2012	13,679,923,000	13.450.142.930	98,32	
2013	17,248,231,000	13.896.315.450	80,57	

Sumber : Data Sekunder Olahan Penulis Tahun 2014

Catatan:

RPAD = Rasio Pendapatan Asli Daerah

TPAD = Target Pendapatan Asli Daerah

RPD = Realisasi Pendapatan Daerah

Dari capaian efektifitas Pendapatan Asli Daerah sebagaimana di terdapat dalam tabel diatas menunjukan bahwa efektifitas PAD tahun 2010 mencapai kriteria sangat efektif yakni 158,02%. Peningkatan ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adanya Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Bank NTT sebesar Rp. 2.802.545.672,72. Realisasi PAD tahun 2009 lebih kecil dari tahun 2009 disebabkan karena pada tahun 2009 pemerintah kabupaten Nagekeo belum menentukan target dan realisasi pendapatan penyertaan modal pemerintah kabupaten Nagekeo pada PT. Bank NTT sehingga deviden dari PT. Bank NTT belum diterima, dan pemerintah baru melakukan penyertaan modal pada tahun 2009 maka bagian laba usaha diberikan kepada pemerintah dengan jumlah yang disebutkan di atas, sehingga mengakibatkan efektifitas pendapatan Asli daerah meningkat. Selain itu juga masih terdapat pendapatan lain seperti perolehan Bagian Laba Atas Pinjaman Pada Koperasi dan Kelompok Masyarakat 79.515.000,00, adanya Penerimaan Jasa Giro 2.336.631.100,71, adanya Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 123.458.788,94 dan adanya Pendapatan Denda Retribusi 61.859.348,63. Penerimaan Komisi, Potongan, dan Selisih Nilai Tukar Rupiah sebesar Rp. 878.590.069. Selanjutnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nageko dalam tahun yang lain belum mencapai kategori efektif termasuk tahun

2013, hal ini disebabkan oleh faktor komponen PAD yang realisasinya belum mencapai target antara lain:

1) Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu komponen yang dapat memperbesar pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu upaya penerimaan Pajak Daerah sesuai dengan yang ditargetkan merupakan hal yang sangat penting, karena peningkatan Pajak Daerah akan mempengaruhi peningkatan PAD. Untuk itu berikut ini dapat ditunjukkan Realisasi pajak Daerah dari tahun 2009-2013.

Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2009 - 2013

TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	%
2008	1,187,627,761	555,417,911	46.77
2009	1,321,068,192	1,085,170,908	82.14
2010	1,113,346,750	1,176,230,568	105.65
2011	1,590,325,000	1,704,126,016	107.16
2012	2,044,668,000	1,521,054,554	74.39

Sumber : Data Sekunder Olahan Penulis Tahun 2014

Hasil penelitian sebagaimana dalam tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa pajak daerah yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tidak semuanya memberikan kontribusi yang maksimal karena ada beberapa komponen yang realisasinya tidak mencapai 100% antara lain pajak hotel, pajak hiburan dan pajak bahan galian golongan C. Realisasi ketiga komponen tersebut yang dapat diperoleh informasi dalam penelitian khusus tahun 2013 dapat dijelaskan bahwa pajak hotel, pajak hiburan dan pajak bahan galian golongan C tidak mencapai target disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kurang adanya pengawasan terhadap penerimaan pajak yang dilakukan oleh petugas maupun pengawasan secara administrasi. Pengawasan administrasi yang dimaksud adalah semua penerimaan pajak harus dilakukan pencapatan berdasarkan tanggal pungutan, obyek pungutan dan jumlah pungutan dilampiri dengan bukti penerimaan. Hasil penelitian menunjukkan belum ada pengawasan baik pengawasan melekat maupun pengawasan administrasi. Hal ini juga merupakan salah satu temuan dari BPK RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) yakni pemerintah belum melakukan pencatatan yang memadai terhadap penerimaan pajak daerah dan belum ada cukup bukti yang menunjang jumlah penerimaan pajak daerah.

Selanjutnya penerimaan komponen pajak yang melebihi target seperti pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan dan Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan disebabkan bertambahnya usaha restoran, semakin banyaknya pemasangan reklame, adanya penambahan

volume lampu penerangan jalan dan semakin meningkat masyarakat mengurus kepemilikan hak atas tanah melalui pengurusan sertifikat tanah.

2) Retribusi Daerah

Selain Pajak daerah, Retribusi Daerah juga merupakan komponen yang dapat memperbesar pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu upaya penerimaan Retribusi Daerah sesuai dengan yang ditargetkan merupakan hal yang sangat penting, karena peningkatan Retribusi Daerah akan mempengaruhi peningkatan PAD. Untuk itu berikut ini dapat ditunjukkan Realisasi Retribusi Daerah dari tahun 2009 - 2013.

Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2009 - 2013

TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	%
2009	1,345,900,800	703,011,253	52.23
2010	1,373,234,309	1,091,657,429	79.50
2011	1,578,012,383	1,542,850,442	97.77
2012	5,332,437,000	3,661,086,458	68.66
2013	6,907,570,000	5,797,622,043	83.93

Sumber : Data Sekunder Olahan Penulis Tahun 2014

Hasil penelitian sebagaimana dalam tabel di atas menunjukkan bahwa retribusi daerah yang terdiri dari retribusi umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu tidak semuanya memberikan kontribusi yang maksimal karena retribusi perizinan tertentu yang berhasil realisasinya sesuai target sedangkan realisasi retribusi umum dan retribusi jasa usaha realisasinya tidak sesuai target. Realisasi kedua komponen tersebut yang dapat diperoleh informasi dalam penelitian khusus tahun 2013 dapat dijelaskan bahwa komponen retribusi jasa umum yang realisasinya belum mencapai target adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar. Faktor yang menyebabkan realisasi retribusi tidak sesuai target adalah belum adanya pengawasan langsung terhadap petugas pemungutan retribusi dan belum adanya pengawasan terhadap administrasi pungutan / penerimaan retribusi sehingga laporan penerimaan retribusi belum dilakukan secara memadai. Belum tersedianya laporan disebabkan oleh belum adanya pencatatan yang memadai dilakukan terhadap penerimaan retribusi. Hal ini juga sesuai dengan temuan BPK RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) yang menyebabkan BPK RI memberikan pendapat atas laporan keuangan pemerintah adalah belum dilakukan pengawasan yang cukup terhadap penerimaan retribusi dan belum dilakukan pencatatan terhadap penerimaan retribusi disertai bukti pendukungnya.

b. Analisis Efektifitas Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan akumulasi dari Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan dan lain lain pendapatan yang sah. Untuk mengetahui efektifitas Pendapatan Daerah kabupaten Nagekeo tahun 2009 s/d 2013 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Rasio Efektifitas Pendapatan Daerah

Tahun	Target Pendapatan Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah	RPD (%)	Kriteria
1	2	$RPD = RPD / APD \times 100\%$		
2009	214.373.883.220	209.506.486.250	97,73	$< 100\%$ = Tidak Efektif $= 100\%$ = Efektif Berimbang $> 100\%$ = Efektif
2010	299.643.688.067	294.216.042.916	98,19	
2011	333.523.853.079	383.872.977.887	115,10	
2012	433.507.504.000	432.482.649.006	99,76	
2013	423.833.281.638	420.537.624.250	99,22	

Sumber : Data Sekunder Olahan Penulis Tahun 2013

Rasio Efektifitas Pendapatan Daerah daerah tahun 2011 sebesar 115,10 % dan masuk dalam kategori efektif.

3. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo ditinjau dari tingkat keserasian keuangan daerah dalam tahun Anggaran 2009 – 2013

Untuk mengetahui keserasian belanja aparatur dengan belanja public maka dapat dilakukan analisis berikut ini :

a. Analisis Rasio Belanja Aparatur Daerah

Belanja aparatur yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Nagekeo adalah belanja subsidi, belanja bunga, belanja hiba, belanja social, Belanja Bantuan Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga. Untuk mengetahui rasio belanja aparatur dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Rasio Belanja Aparatur

Tahun	Anggaran Belanja Aparatur	Realisasi BelanjaAparatur	RPD (%)
1	2	$RBA = RBA / TBA \times 100\%$	
2009	175.584.860.606	122.242.848.930	69,62
2010	262.369.134.599	170.665.324.327	65,05
2011	310.207.542.023	220.677.885.803	71,14
2012	386.377.545.492	260.714.445.515	67,48
2013	432.166.301.410	275.681.118.096	63,79

Sumber : Data Sekunder Olahan Penulis Tahun 2014

b. Analisis Rasio Belanja Publik (Belanja Modal)

Belanja publik atau belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang meliputi belanja tanah, belanja gedung, belanja jalan dan jembatan, belanja irigasi, belanja listrik dan air serta semua belanja yang bersifat investasi jangka panjang. Semakin tinggi belanja publik menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik karena belanja public dapat dimanfaatkan oleh semua masyarakat. Untuk mengetahui rasio belanja public atau belanja modal, maka dapat dilakukan perhitungan berikut ini:

Rasio Belanja Publik

Tahun	Anggaran Belanja Publik	Realisasi Belanja Publik	RBP
1	2	$RBP = RBP / ABP \times 100\%$	(%)
2009	175.584.860.606	52.842.011.686	30,09
2010	262.369.134.599	91.522.272.272	34,88
2011	310.207.542.023	89.368.567.820	28,81
2012	386.377.545.492	123.717.039.477	32,02
2013	432.166.301.410	156.008.811.814	36,10

Sumber : Data Sekunder Olahan Penulis Tahun 2014

Catatan:

¹RBP = Realisasi Belanja Publik

²RBA = Rasio Belanja Aparatur

ABP = Anggaran Belanja Publik

Hasil perhitungan sebagaimana dalam tabel di atas menunjukkan bahwa belum ada keserasian belanja antara belanja aparatur dan belanja public dimana belanja aparatur masih lebih tinggi dari belanja publik dimana rata – rata aparat belanja publik Kabupaten Nagekeo selama tahun 2009 – 2013 adalah 32,38% sedangkan rata – rata belanja aparatur Kabupaten Nagekeo selama tahun 2009 – 2013 adalah 67,42%. Perbandingan Belanja Aparatur dan Belanja Publik Kabupaten Nagekeo Tahun 2009 – 2013 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Perbandingan Rasio Belanja Aparatur dengan Rasio Belanja Tahun 2009-2013

Tahun	Rasio Belanja Aparatur	Rasio Belanja Publik
2009	69,62	30,09
2010	65,5	34,88
2011	71,14	28,81
2012	67,48	32,02
2013	63,79	36,10
Rata-Rata	67,42	32,38

Sumber : Data Sekunder Olahan Penulis Tahun 2014

4. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo ditinjau dari tingkat Pertumbuhan keuangan daerah dalam tahun Anggaran 2009 – 2013

a. Analisis pertumbuhan terhadap pendapatan daerah

Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah
Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun 2009 - 2013

No	Keterangan	Tahun Anggaran				Rata-Rata (%)
		2009	2010	2011	2012	
1	Pendapatan Pajak daerah	95.38	8.39	44.88	-10.74	34.48
2	Pendapatan Retribusi Daerah	55.28	41.33	137.29	58.36	73.07
3	Lain - lain PAD yang sah	307.72	-45.00	32.06	-18.64	69.03
Rata - Rata Pertumkbuhan PAD		152.79	1.57	71.41	9.66	58.86

Sumber : Data Sekunder Olahan Penulis Tahun 2014

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD terbesar terjadi pada tahun 2010 sebesar 152,79% dimana capaian ini disebabkan oleh penerimaan lain – lain pendapatan yang sah sebesar 307,72%, sedangkan pertumbuhan PAD terkecil terjadi pada tahun 2011 sebesar 1,57% dimana capaian ini disebabkan oleh menurunnya pajak daerah menjadi 8,39% dari 95,28%, menurunnya retribusi daerah menjadi 41,33% dari 55,28%, dan menurunnya rasio pendapatan lain – lain daerah dari (-45%) dari 307,72%.

Dengan demikian maka Rata-rata pertumbuhan PAD Pemerintah Kabupaten Nagekeo selama tahun 2008-2012 sebesar 58,86% dan menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hal ini memberikan gambaran keberhasilan Pemerintah Kabupaten Nagekeo dalam meningkatkan PAD. Rata-rata pertumbuhan pajak daerah sebesar 34,48%, retribusi daerah sebesar 73,07%, dan lain-lain PAD sebesar 69,03%.

PENUTUP

Kesimpulan

- Rasio Kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo dari tahun 2009 s/d tahun 2013 dinilai masih sangat kurang karena berada pada skala rasio 0% - 10%. Kemandirian keuangan daerah kabupaten Nagekeo berada dalam Pola hubungan instruktif, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah sehingga dinilai pemerintah daerah belum mandiri melaksanakan otonomi daerah.
- Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nagekeo tahun 2009 – 2013 adalah 99,14% dalam kategori cukup efektif. Pendapatan Asli Daerah kabupaten Nagekeo belum

mencapai kategori efektif disebabkan oleh beberapa komponen PAD seperti pajak daerah dan retribusi daerah yang realisasinya belum mencapai target yakni pajak daerah realisasi sebesar 74,39% dan retribusi daerah realisasinya sebesar 83,93%.

- c. Belum ada keserasian belanja antara belanja aparatur dan belanja publik dimana belanja aparatur masih lebih tinggi dari belanja publik dimana rata – rata belanja publik Kabupaten Nagekeo selama tahun 2009 – 2013 adalah 32,38% sedangkan rata rata belanja aparatur Kabupaten Nagekeo selama tahun 2009 – 2013 adalah 67,42%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Nagekeo lebih memperhatikan pelayanan kepada aparatur daerah dan belum kepada penekanan pelayanan publik yang nantinya dapat dinikmati langsung oleh publik atau masyarakat

Saran

Disarankan agar pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo dapat meningkatkan kemandirian Daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Upaya yang harus dilakukan pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo antara lain tingkatkan komunikasi dan informasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat dalam hal kebijakan pungutan pajak dan retribusi daerah, penambahan pegawai supaya kedepannya penagihan pajak dan retribusi dapat dilakukan secara efektif dan efisien, penambahan fasilitas penunjang seperti kendaraan operasional lapangan, mengharuskan adanya ketegasan pemerintah dalam melakukan sanksi hukum bagi masyarakat yang enggan bahkan tidak melakukan pembayaran pajak dan retribusi sehingga memberikan efek jera kepada masyarakat wajib pajak yang lainnya untuk melakukan pembayaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayuningsasi 2004, *Analisis perimbangan dan pertumbuhan belanja daerah Propinsi Bali* tahun 1998 sampai tahun 2002
- Bastian, Indra, 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, BPFE, Yogyakarta.
- Halim Abdul, 2004. *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*, Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, UUP AMP YKPN, Yogyakarta
- Hariadi Pramono; 2010; *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Balai Penerbit Salemba Empat Jakarta
- Hirawan Susiyati B., 1991, "*Pembiayaan Pembangunan Daerah*", Dalam Arsyad Anwar (Editor), *Prospek Ekonomi Jangka Pendek dan Sumber Pembiayaan Pembangunan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mahmudi, 2007, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik*, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta

-
- Mahsun Mohamad, 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Balai Penerbit Fakultas Ekonomi UGM Yogyakarta
- Mamesah, D. J., 1995, *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi II, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi, Yogyakarta.
- Mulyana Budi 2010, *Perencanaan dan Penganggaran Daerah*. Kementerian keuangan republik Indonesia Badan pendidikan dan pelatihan keuangan Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 105, Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 41, Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 2006. Depdagri RI.
- Prabowo Nurlan, 1999; *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta, Penerbit PT Indeks, Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Sidharta, Ananta Eka, 2008. *Analisis Kinerja Keuangan Pemda dengan Pendekatan Analisis Rasio Keuangan pada APBD di Kota Malang*. Jurnal Penelitian Uneriversitas Negri Malang. Tahun 20 Nomor 2.
- Undang-undang Nomor 25, Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 33, Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, 2004. Depdagri RI.
- Usman, Nurzaman, 1998, *Otonomi dan Implikasinya Terhadap Kemampuan Keuangan Daerah*, Jurnal Ekonomi dan Manajemen, Volume IV No.1 dan 2, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Padang.